

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL**

NOTA DINAS

Nomor : 11/ND/D-I/KPS.02.00/03/2022

Kepada : Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama
Dari : Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial
Hal : Usulan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2023 Deputy Bidang Koordinasi
Peningkatan Kesejahteraan Sosial
Tanggal : 25 Maret 2022

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Nota Dinas Nomor 391/ND//SES/REN/05.01/III/2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023, dengan ini kami sampaikan usulan Rencana Kerja Tahunan 2023 Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial yang telah mengacu pada beberapa dokumen, yaitu:

- a. Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas (ProP) dalam RPJMN 2020-2024
- b. Janji Prioritas Presiden bidang PMK
- c. Major Project bidang PMK
- d. Isu Strategis bidang PMK dalam RPJMN 2020-2024

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Deputy Bidang
Peningkatan
Kesejahteraan Sosial



Ade Rustama

MATRIKS PENYUSUNAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2023

NO	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	TARGET	USULAN ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1	Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang PMK	1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Layanan Manajemen Kinerja	1 Layanan	122.520.000	Sekretaris Deputi
		2. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal		1 Dokumen	631.120.000	
		3. Layanan Umum Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2 Layanan	125.400.000	
					120.960.000	
TOTAL					1.000.000.000	

Jakarta, 25 Maret 2022
 Sekretaris Deputy,



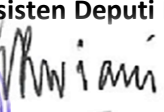

Ade Rustama

MATRIKS PENYUSUNAN RENCANA KERJA ASDEP PENANGANAN KEMISKINAN TAHUN 2023

NO	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	RAK	RANCANGAN RKP 2022				Janji Presiden	MAJOR PROJECT	ISU STRATEGIS BIDANG PMK	USULAN ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNGJAWAB	
					PRIORITAS NASIONAL (PN)	PROGRAM PRIORITAS (PP)	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL (KP)	PROYEK PRIORITAS (Prp)						
1	Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) Bidang Penanganan Kemiskinan	2 RAK	RAK Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar dan Pengentasan Kemiskinan	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar (PN 5)	Infrastruktur pelayanan Dasar (PP 1)	Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau (KP 1)	01-Peningkatan Fasilitas Penyediaan Hunian Baru 03-Pengembangan Fasilitas Peningkatan Kualitas Rumah 04-Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman 06-Fasilitas Penanganan Permukiman Kumuh		Akses Sanitasi (Air Limba Domestik) layak dan aman (90% rumah tangga)	-Akses dan kualitas pelayanan dasar yang terbatas (perumahan layak huni 56,75%, air minum layak 89,27%, sanitasi layak 77,4%, Kementerian PPN/Bappenas, 2020) -Keterbatasan akses perumahan dan permukiman yang layak, aman dan terjangkau (rumah tangga yang menempati rumah layak huni nasional Tahun 2018 masih sebesar 38,30% dengan akses air minum layak 61,29% dan akses sanitasi layak 74,58% -Rendahnya kapasitas daerah, pengelola dan lembaga penyelenggara untuk pengembangan layanan dasar permukiman -Belum optimalnya implementasi kebijakan pemerintah terkait penyediaan layanan dasar permukiman yang terlihat dari masih rendahnya akses masyarakat terhadap layanan dasar. -Belum optimalnya peningkatan akses sanitasi (air limbah) kepada masyarakat	Rp	680,680,000	
					Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas (PN 1)	Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi (PP 5)	Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah besar (KP1)	02-Perluasan Kemitraan Usaha 01-Dukungan Pemberian Modal Awal Usaha 02-Pendampingan UMKM untuk Mengakses Kredit 01-Pendampingan akses permodalan bagi wirausaha sosial berbasis ekonomi kreatif 02-Pembinaan Wirausaha Sosial			- Tren kewirausahaan belum diiringi kapasitas yang memadai - Baru 25,6% RT miskin memiliki akses layanan keuangan			
					Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing (PN 3)	Pengentasan Kemiskinan (PP 6)	Akselerasi penguatan ekonomi keluarga (KP 1)	01-Fasilitasi Modal Usaha 01-Fasilitasi keberantaraan usaha produktif 02-Penguatan pemberdayaan berdampak sosial			Kelompok miskin dan rentan sulit bersaing dalam usaha produktif			
				RAK Pengelolaan Sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing (PN 3)	Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan (PP 1)	Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan (KP 2)	Penguatan integrasi data admininstrasi kependudukan	Tersedianya data kesejahteraan sosial		-Data kependudukan belum valid sebagai dasar penyusunan kebijakan -Laju kemiskinan cenderung melambat			
						Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan (PP 1)	Pendampingan dan Layanan Terpadu (KP 3)	01-Penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan.	Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	-Data kependudukan belum valid sebagai dasar penyusunan kebijakan -Laju kemiskinan cenderung melambat	Rp	452,320,000	
	Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan	Koordinasi Kebijakan Bidang Penanganan	1 Koorinasi	Koordinasi Kebijakan Penanganan Kantong Kemiskinan Untuk Penurunan Kemiskinan	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar (PN 5)	Infrastruktur pelayanan Dasar (PP 1)	Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau (KP 1)	01-Peningkatan Fasilitas Penyediaan Hunian Baru 03-Pengembangan Fasilitas Peningkatan Kualitas Rumah 04-Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman 06-Fasilitas Penanganan Permukiman Kumuh		Akses Sanitasi (Air Limba Domestik) layak dan aman (90% rumah tangga)	-Akses dan kualitas pelayanan dasar yang terbatas (perumahan layak huni 56,75%, air minum layak 89,27%, sanitasi layak 77,4%, Kementerian PPN/Bappenas, 2020) -Keterbatasan akses perumahan dan permukiman yang layak, aman dan terjangkau (rumah tangga yang menempati rumah layak huni nasional Tahun 2018 masih sebesar 38,30% dengan akses air minum layak 61,29% dan akses sanitasi layak 74,58% -Rendahnya kapasitas daerah, pengelola dan lembaga penyelenggara untuk pengembangan layanan dasar	Rp	750,000,000	Asdep Penanganan Kemiskinan

	Sosial	Kemiskinan		Ekstrem		Infrastruktur perkotaan (PP3)	Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan (KP 4)	01-Fasilitasi Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan			perumahan		
											-Belum optimalnya implementasi kebijakan pemerintah terkait penyediaan layanan dasar permukiman yang terlihat dari masih rendahnya akses masyarakat terhadap layanan dasar.		
											-Belum optimalnya peningkatan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman		
	Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Koordinasi Kebijakan Bidang Penanganan Kemiskinan	1 Kordinasi	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar (PN 5)	Infrastruktur pelayanan Dasar (PP 1)	Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau (KP 1)	01-Peningkatan Fasilitas Penyediaan Hunian Baru 03-Pengembangan Fasilitas Peningkatan Kualitas Rumah 04-Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman 06-Fasilitasi Penanganan Permukiman Kumuh		Akses Sanitasi (Air Limba Domestik) layak dan aman (90% rumah tangga)	-Akses dan kualitas pelayanan dasar yang terbatas (perumahan layak huni 56,75%, air minum layak 89,27%, sanitasi layak 77,4%, Kementerian PPN/Bappenas, 2020) -Keterbatasan akses perumahan dan permukiman yang layak, aman dan terjangkau (rumah tangga yang menempati rumah layak huni nasional Tahun 2018 masih sebesar 38,30% dengan akses air minum layak 61,29% dan akses sanitasi layak 74,58%		
					Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (PN2)	Infrastruktur perkotaan (PP3)	Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan (KP4)	01-Fasilitasi Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan			-Rendahnya kapasitas daerah, pengelola dan lembaga penyelenggara untuk pengembangan layanan dasar permukiman -Belum optimalnya implementasi kebijakan pemerintah terkait penyediaan layanan dasar permukiman yang terlihat dari masih rendahnya akses masyarakat terhadap layanan dasar.	Rp	
						Pembangunan Wilayah Papua (PP7)	Pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan dan transmigrasi (KP4)	09-Peningkatan kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi proiritas di Provinsi Papua			-Belum optimalnya peningkatan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman		
TOTAL												Rp	2,633,000,000

Jakarta, 25 Maret 2022
Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan


Eni Rukawiani

Nomor : 11 /ND/D-I/KPS.02.00/03/2022

Tanggal : 25 Maret 2022

MATRIKS PENYUSUNAN RENCANA KERJA ASDEP JAMINAN SOSIAL TAHUN 2023

NO	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	TARGET	RAK	RPJMN 2020-2024				JANJI PRESIDEN	MAJOR PROJECT	ISU STRATEGIS BIDANG PMK	USULAN ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
					PRIORITAS NASIONAL (PN)	PROGRAM PRIORITAS (PP)	KEGIATAN PRIORITAS (KP)	PROYEK PRIORITAS (ProP)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Jaminan Sosial	2 RAK	RAK Penguatan Regulasi, Perluasan Kepesertaan dan Pengembangan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing (PN 3)	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PP 2)	Sistem Jaminan Sosial Nasional (KP 1)	Pengembangan Program Jaminan Sosial (ProP 1)	-	-	Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk Indonesia	Rp533.932.000	Asdep Jaminan Sosial
				RAK Penguatan Regulasi, Perluasan Kepesertaan dan Pengembangan Program Jaminan Kesehatan Nasional	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing (PN 3)	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PP 2)	Sistem Jaminan Sosial Nasional (KP 1)	Pengembangan Program Jaminan Sosial (ProP 1)	Melanjutkan JKN	-	Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk Indonesia	Rp547.558.000	
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional	Koordinasi Program Jaminan Kesehatan Nasional	1 Koordinasi	Koordinasi Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing (PN 3)	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PP 2)	Sistem Jaminan Sosial Nasional (KP 1)	Pengembangan Program Jaminan Sosial (ProP 1)	Melanjutkan JKN	-	Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk Indonesia	Rp1.000.000.000	
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Optimalisasi	Koordinasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerja	1 Koordinasi	Koordinasi Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PP 2)	Sistem Jaminan Sosial Nasional (KP 1)	Pengembangan Program Jaminan Sosial (ProP 1)	-	-	Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk Indonesia	Rp1.000.000.000	

	Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	an		Ketenagakerjaan (PN 3)									
TOTAL												3.081.490.000	

Keterangan:

- Kolom 1 diisi nomor sesuai urutan;
- Kolom 2 diisi nomenklatur Kegiatan;
- Kolom 3 diisi nomenklatur Rincian Output (RO);
- Kolom 4 diisi jumlah target RO;
- Kolom 5 diisi nama RAK;
- Kolom 6 diisi PN yang terkait dengan RAK yang akan dihasilkan pada kolom 5, jika ada;
- Kolom 7 diisi PP yang terkait dengan RAK yang akan dihasilkan pada kolom 5, jika ada;
- Kolom 8 diisi KP yang terkait dengan RAK yang akan dihasilkan pada kolom 5, jika ada;
- Kolom 9 diisi ProP yang terkait dengan RAK yang akan dihasilkan pada kolom 5, jika ada;
- Kolom 10 diisi Janji Presiden yang terkait dengan RAK yang akan dihasilkan pada kolom 5, jika ada;
- Kolom 11 diisi Major Project yang terkait dengan RAK yang akan dihasilkan pada kolom 5, jika ada;
- Kolom 12 diisi Isu Strategis yang terkait dengan RAK yang akan dihasilkan pada kolom 5, jika ada;
- Kolom 13 diisi alokasi anggaran yang diusulkan untuk RAK yang akan dihasilkan pada kolom 5, jika ada;
- Kolom 14 diisi Pejabat Eselon II selaku penanggung jawab kegiatan

Jakarta, 25 Maret 2022

Dyah Tri Kumolosari

Nomor : 11/ND/D-1/KPS.02.00/03/2022
 tanggal : 25 Maret 2022

MATRIKS PENYUSUNAN RENCANA KERJA ASDEP BANTUAN DAN SUBSIDI TEPAT SASARAN TAHUN 2023

NO	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	RAK	RANCANGAN RKP 2023				Janji Presiden	MAJOR PROJECT	ISU STRATEGIS BIDANG PMK	USULAN ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNGJAWAB
					PRIORITAS NASIONAL (PN)	PROGRAM PRIORITAS (PP)	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL (KP)	PROYEK PRIORITAS (Prop)					
1	Koordinasi Kebijakan Bidang Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran	Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) Bidang Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran	2 RAK	Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) dan Integrasi Bantuan Sosial	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing (PN-3)	Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial (PP-2)	Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran (KP-2)	Penyelenggaraan bantuan dan subsidi tepat sasaran (PRP-01)	Kartu Sembako Murah Melanjutkan reformasi sistem bantuan sosial seperti KIP, PBI, JKN-KIS, PKH, BPNT sehingga lebih sederhana, transparan, tepat sasaran, terintegrasi serta memperhatikan penciptaan multiplier bagi ekonomi UMKM	Integrasi bantuan sosial menuju skema perlindungan sosial menyeluruh	Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk	753.535.000	Asdep Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran
				Transformasi Subsidi Energi Tepat Sasaran	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing (PN-3)	Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial (PP-2)	Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran (KP-2)	Penyelenggaraan bantuan dan subsidi tepat sasaran (PRP-01)	Melanjutkan reformasi sistem bantuan sosial seperti KIP, PBI, JKN-KIS, PKH, BPNT sehingga lebih sederhana, transparan, tepat sasaran, terintegrasi serta memperhatikan penciptaan multiplier bagi ekonomi UMKM	Integrasi bantuan sosial menuju skema perlindungan sosial menyeluruh		533.955.000	
2	Pemantauan Pengurangan Beban Pengeluaran Untuk Penurunan Kemiskinan Ekstrem	Laporan Pemantauan Pengurangan Beban Pengeluaran Untuk Penurunan Kemiskinan Ekstrem	Pemantauan		Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing (PN-3)	Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial (PP-2)	Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran (KP-2)	Penyelenggaraan bantuan dan subsidi tepat sasaran (PRP-01)	Melanjutkan reformasi sistem bantuan sosial seperti KIP, PBI, JKN-KIS, PKH, BPNT sehingga lebih sederhana, transparan, tepat sasaran, terintegrasi serta memperhatikan penciptaan multiplier bagi ekonomi UMKM	Integrasi bantuan sosial menuju skema perlindungan sosial menyeluruh		1.000.000.000	
TOTAL												2.287.490.000	

Jakarta, 25 Maret 2022

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan
 Kesejahteraan Sosial



Andie Megantara

Nomor : 11 /ND/D-I/KPS.02.00/03/2022
 Tanggal : 25 Maret 2022

MATRIKS PENYUSUNAN RENCANAN KERJA ASDEP PEMBERDAYAAN DISABILITAS DAN LANJUT USIA TAHUN 2023

NO	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	TARGET	RAK	RPJMN 2020-2024				JANJI PRESIDEN	MAJOR PROJECT	ISU STRATEGIS BIDANG PMK	USULAN ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANG-GUNG JAWAB
					PRIORITAS NASIONAL (PN)	PROGRAM PRIORITAS (PP)	KEGIATAN PRIORITAS (KP)	PROYEK PRIORITAS (ProP)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut Usia	3 RAK	RAK Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing (PN 3)	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PP 2)	Kesejahteraan Sosial (KP 4)	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Inklusif (ProP 1) Penguatan Pelayanan Sosial Kelompok Rentan Lainnya (ProP 4)			Pengentasan Kemiskinan (Kelompok Miskin dan Rentan Sulit Bersaing dalam Usaha Produktif)	750.000.000	Asdep Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut Usia
				RAK Penguatan Layanan Terpadu dan Pendampingan Bagi Lanjut Usia	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing (PN 3)	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PP 2)	Kesejahteraan Sosial (KP 4)	Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Kelanjutusiaan (ProP 2) Pelaksanaan Perawatan Jangka Panjang Berbasis Komunitas yang Terintegrasi (ProP 3)			Pemenuhan Layanan Dasar	750.000.000	

2.		Koordinasi Perlindungan Jaminan Sosial bagi Disabilitas Akibat Kecelakaan Kerja	1 Kegiatan		Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing (PN 3)	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PP 2)	Kesejahteraan Sosial (KP 4)	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Inklusif (ProP 1)		Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk	500 000 000	Asdep Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut Usia
3.		Koordinasi Pengembangan Sistem Pelayanan Perawatan Jangka Panjang yang Terintegrasi bagi Lanjut Usia	1 Kegiatan		Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing (PN 3)	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PP 2)	Kesejahteraan Sosial (KP 4)	Pelaksanaan Perawatan Jangka Panjang berbasis komunitas yang terintegrasi (Long-term Care) (ProP 3)		Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	Pemenuhan Layanan Dasar	500.000.000	Asdep Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut Usia
TOTAL												2.500.000.000	

Keterangan

- Kolom 1 diisi nomor sesuai urutan;
- Kolom 2 diisi nomenklatur Kegiatan,
- Kolom 3 diisi nomenklatur Rincian Output (RO);
- Kolom 4 diisi jumlah target RO;
- Kolom 5 diisi nama RAK;
- Kolom 6 diisi PN yang terkait dengan RAK yang akan dihasilkan pada kolom 5, jika ada;
- Kolom 7 diisi PP yang terkait dengan RAK yang akan dihasilkan pada kolom 5, jika ada;
- Kolom 8 diisi KP yang terkait dengan RAK yang akan dihasilkan pada kolom 5, jika ada;
- Kolom 9 diisi ProP yang terkait dengan RAK yang akan dihasilkan pada kolom 5, jika ada;
- Kolom 10 diisi Janji Presiden yang terkait dengan RAK yang akan dihasilkan pada kolom 5, jika ada;
- Kolom 11 diisi Major Project yang terkait dengan RAK yang akan dihasilkan pada kolom 5, jika ada;
- Kolom 12 diisi Isu Strategis yang terkait dengan RAK yang akan dihasilkan pada kolom 5, jika ada;
- Kolom 13 diisi alokasi anggaran yang diusulkan untuk RAK yang akan dihasilkan pada kolom 5, jika ada;
- Kolom 14 diisi Pejabat Eselon II selaku penanggung jawab kegiatan

Jakarta, 25 Maret 2022
**Asdep Pemberdayaan Disabilitas
Dan Lanjut Usia**

Ponco Respati Nugroho